

Betapa Berat Beban Pejabat Pemerintah Saat ini

Kalau menyaksikan tayangan televisi dan juga ulasan pendapat di media massa lainnya pada akhir-akhir ini, maka bisa dibayangkan betapa berat beban pejabat pemerintah yang sedang diembannya. Kritik dan komentar datang dari berbagai kalangan, lebih-lebih terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh M. Nazaruddin.

Apapun yang dilakukan oleh pemerintah seolah-olah serba salah. Presiden mendapat surat pribadi dari Nazaruddin dikomentari berlebih, dan apalagi tatkala surat itu dibalas kembali olehnya. Hanya dengan membalas surat tersebut, maka dianggap melebihi kewajiban, baik terkait rentang waktu membalasnya yang sedemikian singkat, maupun lainnya. Seolah-olah presiden tidak pernah ada benarnya.

Beban pemerintah sedemikian menumpuk dan amat berat untuk diselesaikan. Persoalan tentang jumlah pengangguran yang semakin banyak, kemiskinan masih terdapat di mana-mana, lapangan pekerjaan yang terbatas jumlahnya, keterbatasan sumber energi, persediaan pangan yang harus dijaga kecukupan dan stabilitasnya, pendidikan yang belum beranjak naik kualitasnya, dan masih banyak lagi lainnya.

Memperhatikan beban berat itu rasanya tidak sampai hati untuk menambah dan apalagi memberikan kritik tajam yang tidak mungkin bisa direspon secara cepat. Beban itu menjadi lebih berat lagi, oleh karena ternyata orang-orang dekat yang diberi kepercayaan tidak amanah. Mereka melakukan korupsi, hingga besarnya tidak mudah dinalar.

Beratnya beban dan tanggung jawab itu, bisa dilihat pada satu aspek saja, misalnya terkait pemberantasan korupsi yang menjadi tuntutan utama masyarakat. Gerakan pemberantasan korupsi dicanangkan, dan bahkan digelorakan pernyataan perang melawan korupsi. Selain itu, telah dibentuklah komisi yang khusus menangani kasus-kasus korupsi, yakni KPK. Tetapi ternyata, pada KPK sendiri terdapat oknum, dan bahkan pimpinannya, harus dimasukkan ke penjara.

Pemerintah telah memiliki perangkat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim. Mereka itu bertugas dan bertanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan. Namun lagi-lagi tidak sedikit oknum di lembaga tersebut, juga melakukannya, sehingga korupsi ada di mana-mana, merata di semua instansi pemerintah.

Lewat gerakan pemberantasan korupsi itu, ditemukan oknum pejabat di berbagai level, mulai lurah, camat, bupati atau walikota, gubernur, pimpinan bank, BUMN, anggota DPR, mantan menteri, ternyata kedapatan mereka melakukan tindak kejahatan korupsi. Menurut informasi, bahwa lebih dari separo gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia telah menjadi tersangka, dan bahkan sebagian sudah masuk penjara.

Memperhatikan besarnya jumlah pelaku penyimpangan itu, bisa diduga bahwa mereka yang masih selamat, tidak berarti selalu bersih, melainkan bisa jadi, hanya karena belum dilaporkan dan ditangkap saja. Oleh karena itu sebenarnya, korupsi telah dilakukan oleh semua kalangan. Sehingga pemberantasnya akan sangat sulit, sebab pihak-pihak yang

bertugas dan bertanggung memberantas kejahatan tersebut ternyata juga melakukannya sendiri.

Gambaran tentang betapa berat dan rumitnya persoalan yang digambarkan tersebut, adalah baru sebatas aspek pemberantasan korupsi, dan belum aspek lainnya yang lebih luas. Dan ternyata beban berat pejabat itu masih ditambah dengan lainnya, misalnya mereka masih harus merangkap jabatan penting di partai politik. Padahal keduanya, sedemikian sama-sama beratnya.

Beban berat yang terlalu berlebih seperti digambarkan itu, kiranya ke depan perlu dipertimbangkan, sehingga seseorang tidak menanggung tanggung jawab di luar jangkauannya. Mungkin hal itu tidak menjadi masalah ketika semua bisa berjalan secara normal. Akan tetapi tatkala pada keduanya muncul persoalan berat, -----sebagaimana terjadi sekarang ini, maka beban itu tampak tidak mudah diselesaikan.

Resiko rangkap jabatan kadang juga berdampak terlalu jauh, hingga melahirkan dugaan-dugaan yang tidak perlu terjadi. Misalnya, menteri yang sekaligus juga sebagai pimpinan partai politik dan semacamnya, maka jabatan itu dianggap sebagai mesin pengumpul dana bagi partai yang bersangkutan. Kasus M. Nazaruddin hingga dianggap istimewa, sampai menjadi perhatian yang sedemikian luas, sebenarnya adalah oleh karena, adanya dugaan seperti itu.

Bangsa ini harus bangkit dan maju, tidak boleh berhenti dan apalagi hanya kaya masalah. Bangsa Indonesia harus kembali pada jati dirinya, yaitu menjadi bangsa besar, unggul dan berperadaban tinggi. Ir. Soekarno, presiden pertama dan sekaligus proklamator kemerdekaan negara ini selalu mengatakan bahwa bangsa Indonesia bukan *bangsa tempe*, tetapi bangsa yang mampu berdikari -----berdiri di atas kaki sendiri. Demikian pula Bung Hatta pernah berpesan, bangsa ini jangan sampai menjadi kuli di negerinya sendiri.

Jiwa besar yang dibangun oleh pendiri bangsa ini harus selalu dipelihara dari generasi ke generasi. Korupsi harus diberantas. Tetapi juga tidak boleh terjadi, upaya pemberantasan korupsi itu justru mendapat kerugian, misalnya terjadi saling tuduh menuduh, menjatuhkan, dendam yang tidak berakhir. Bangsa ini harus tetap satu dan tidak boleh ada yang merasa paling unggul dan bersih, sementara lainnya dianggap salah hingga menanggung derita yang berlebihan. Di tengah-tengah bangsa yang menghadapi beban berat seperti sekarang ini, perlu ada gerakan bangkit bersama tanpa terkecuali. *Wallahu a'lam*